

NASKAH AKHIR
(07-04-2011)



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2010-2011**

JUMAT, 8 APRIL 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2011**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2010-2011**

JUMAT, 8 APRIL 2011

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,***

**Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,
Hadirin yang berbahagia,**

Hari ini, Pimpinan Dewan menutup Masa Sidang III Tahun Sidang 2010-2011 yang telah dimulai pada tanggal 10 Januari 2011. Dalam masa sidang yang relatif panjang, terdiri dari 63 hari kerja atau 89 hari kalender, kegiatan Dewan cukup padat. Pelaksanaan fungsi legislasi telah mewarnai aktifitas Dewan masa sidang ini, yang telah dilaksanakan oleh Badan Legislasi, Komisi-Komisi Dewan dan Panitia-panitia Khusus. Namun demikian, agenda pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan, juga berjalan berbarengan sesuai porsi kegiatan yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah. Untuk pelaksanaan fungsi anggaran, intensitasnya akan lebih diarahkan pada Masa Sidang IV, dalam bentuk Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2012.

Dewan telah menetapkan pejabat-pejabat publik, seperti penetapan Calon Anggota Ombudsman dalam Rapat Paripurna tanggal 25 Januari 2011. Dewan juga telah menyetujui Kantor Akuntan Publik (KAP) Calon Pemeriksa

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPK tahun anggaran 2010, yaitu KAP Wisnu B. Suwito dan Rekan, yang disahkan Rapat Paripurna tanggal 29 Maret 2011. Dewan juga telah memberikan rekomendasi penetapan 11 (sebelas) calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia sesuai dengan mekanisme Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Untuk pelaksanaan fungsi legislasi, sebagaimana ditetapkan melalui Program Prioritas tahun 2011, Dewan dapat menyelesaikan 4 (empat) RUU pada masa sidang ini, yaitu RUU Transfer Dana, RUU Akuntan Publik, RUU Keimigrasian, dan RUU Informasi Geospasial. Sidang Paripurna pada tanggal 7 April 2011 juga telah menyetujui dua usulan RUU dari Komisi X menjadi RUU Inisiatif DPR RI yaitu RUU Pendidikan Kedokteran dan RUU Pendidikan Tinggi. Adapun beberapa RUU yang telah diproses dalam Pembicaraan Tingkat I namun belum memasuki Pembicaraan Tingkat II, akan diagendakan pada Masa Persidangan IV. Nama-nama RUU tersebut kami sertakan dalam lampiran pidato ini.

Berbagai upaya terobosan ditetapkan untuk mengejar intensitas penyelesaian RUU, namun berbagai kendala masih juga dihadapi. Pimpinan Dewan berpendapat, substansi krusial yang masih perlu pendalaman dan kata sepakat di dalam pembahasannya, dapat ditempuh melalui serangkaian lobi dan konsultasi, baik antara DPR dan Pemerintah maupun antar-fraksi di DPR-RI.

Dari 4 (empat) RUU yang berhasil disahkan, hadirnya RUU tentang Transfer Dana, diharapkan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap iklim usaha di Indonesia. Meningkatnya kepercayaan tersebut antara lain tercermin dari arus transaksi perpindahan dana yang menunjukkan peningkatan, tidak saja dari sisi jumlah transaksi, tetapi juga dari sisi nilai nominal transaksinya. Pergerakan dana secara lintas batas (*cross border*) telah menjadi kebutuhan para pelaku ekonomi dunia, dan menuntut adanya pemanfaatan yang optimal

dari Pemerintah dan otoritas yang berwenang, sebagai salah satu upaya memajukan perekonomian nasional. Selain itu, UU tentang Transfer Dana diharapkan makin melengkapi "amunisi" aparat penegak hukum, untuk memburu pelaku pencucian uang, menyusul telah disahkannya UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

RUU yang menjadi perhatian masyarakat, yang saat ini tengah dibahas intensif oleh Komisi Dewan antara lain RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan RUU tentang Intelijen Negara. Masih banyak permasalahan atas RUU-RUU tersebut yang memerlukan pendalaman lebih lanjut berkaitan dengan materi-materi yang dianggap sangat krusial. Untuk RUU Keistimewaan Provinsi D.I. Yogyakarta, berkaitan dengan mekanisme penetapan atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY. Sedangkan untuk RUU Intelijen Negara, berkaitan dengan kewenangan lembaga ini khususnya kewenangan penyadapan dan penangkapan yang masih perlu kajian lebih mendalam.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam hal pelaksanaan bidang pengawasan, yang mengemuka pada Masa Sidang III ini adalah usulan para anggota DPR tentang penggunaan Hak Angket terhadap Kasus Mafia Pajak. Walaupun usulan ini tidak mendapat persetujuan Dewan, tidak berarti Dewan tidak memiliki komitmen terhadap pemberantasan mafia pajak. Dewan akan mengintensifkan fungsi pengawasan melalui optimalisasi Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan yang telah dibentuk oleh Komisi III.

Panja ini telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) antara lain dengan Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Kabareskrim Polri, termasuk dengan

mantan Kapolri, aparat perpajakan, dan pihak-pihak yang terkena kasus. Kegiatan ini masih akan berlanjut pada Masa Persidangan IV.

Dewan berharap agar Panja ini dapat memberikan rekomendasi dan solusi bagi penanganan Kasus Mafia Pajak yang saat ini ditangani oleh penegak hukum. Panja ini tidak hanya terfokus pada kasus Gayus Tambunan, namun juga kasus-kasus lain yang merugikan keuangan negara.

Sidang Dewan yang terhormat,

Permasalahan-permasalahan hukum yang banyak mendapatkan sorotan masyarakat dan Dewan antara lain keterlibatan perangkat Lembaga Pemasyarakatan (LP) dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Dewan menyoroti, bahwa kasus keterlibatan narapidana dan oknum petugas dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di LP, bukan kali ini saja, namun sudah seringkali terjadi. Beberapa kali, bahkan ditemukan terjadinya pengaturan atau pengendalian narkoba nasional dan internasional di LP. Jaringan peredaran gelap narkoba di LP, bahkan sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisasi.

DPR-RI telah melakukan perubahan atas UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, yang kini menjadi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Namun, UU belum mampu mencegah meningkatnya jumlah peredaran, produksi, dan pengguna narkoba di Indonesia. Hingga saat ini, pengguna narkoba diperkirakan mencapai 1,5% dari total populasi penduduk. Sementara, jumlah uang yang dibelanjakan untuk konsumsi narkoba di Indonesia mencapai Rp. 20 triliun per tahun, dan jumlah ini diprediksi akan terus meningkat. Perkembangan keadaan tersebut, saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, dan menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan umat manusia, khususnya generasi muda pada umumnya. Sangat diharapkan

adanya penerapan penegakan hukum yang konsekuen dan meningkatkan pengawasan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Menyikapi permasalahan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik Banten, dan kerusuhan di Temanggung Jawa Tengah, Komisi VIII DPR-RI telah melakukan Rapat Kerja bersama Menteri Agama RI dan Kapolri. Dalam rapat ini telah dibahas hal-hal yang berkaitan dengan peran Pemerintah dalam menjamin kebebasan dan kerukunan umat beragama. Kesimpulannya antara lain agar Pemerintah menyelesaikan Kasus Cikeusik dan Temanggung secara adil, cepat, tuntas, dan menyeluruh, sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dewan juga mendorong kepada Pemerintah untuk secara intens mengambil langkah konkret dalam mengimplementasikan SKB Tiga Menteri, termasuk melakukan dialog dengan berbagai pihak, terkait dengan upaya membangun pembinaan kerukunan umat beragama. Dialog tokoh-tokoh agama dalam menyikapi kasus Ahmadiyah, yang baru-baru ini difasilitasi pemerintah, belum menghasilkan solusi yang tepat. Diharapkan partisipasi masyarakat dan peran aktif tokoh lintas agama menyampaikan pesan pentingnya kerukunan dan toleransi kepada berbagai pihak. Berkaitan dengan masalah ini, Dewan mengajukan usulan untuk membentuk RUU tentang Kerukunan Umat Beragama. RUU ini perlu segera dibahas dengan mengedepankan dialog yang intensif dengan semua pihak, seperti para tokoh lintas agama, akademisi, dan dari berbagai golongan masyarakat.

Pada sisi lain, teror "bom buku" yang meresahkan masyarakat, masih saja terjadi, dan Polri belum mampu mengungkap kasus ini. Dewan berharap, ancaman paket bom buku dapat dijadikan momentum untuk membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat, tentang pentingnya melawan bahaya terorisme sekecil apapun yang bisa saja terjadi di sekitar kita. Kewaspadaan terhadap ancaman ini perlu ditingkatkan oleh kita semua. Kepada aparat kepolisian, diharapkan kerja keras dan aparat agar mampu menuntaskannya demi terciptanya rasa aman dan bebas dari rasa ketakutan pada masyarakat.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*". Sesuai amanat konstitusi tersebut, negara berkewajiban menjaga keamanan warga negaranya dari ketakutan terhadap adanya serentetan tindakan terorisme dalam berbagai bentuk di berbagai daerah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Permasalahan BBM Subsidi telah dibahas beberapa kali oleh Komisi VII dengan Menteri ESDM dan jajarannya. Dewan memahami keputusan Pemerintah untuk menunda Pelaksanaan Pengaturan Konsumsi BBM Bersubsidi yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir Kuartal Pertama tahun 2011. Dewan memberi kesempatan kepada Pemerintah, untuk melanjutkan upaya pengendalian konsumsi BBM Bersubsidi sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011. Oleh karena itu, Pemerintah diminta untuk mempersiapkan rencana implementasinya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek regulasi, infrastruktur pengolahan dan distribusi, metode pengawasan, tahapan pelaksanaan maupun sosialisasinya kepada masyarakat luas. Dewan meminta Pemerintah/Kementerian ESDM, agar berkoordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Pemerintah Daerah untuk memperketat pengawasan distribusi BBM Bersubsidi, dan menindak tegas pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi.

Dalam pada itu, Dewan meminta Pemerintah untuk mengantisipasi dampak ketidakstabilan harga minyak mentah di pasar dunia yang sekarang ini sudah melampaui USD 100 per barel dan diprediksi akan terus naik karena krisis politik Timur Tengah. Semakin lama Pemerintah menunda kebijakan terkait harga BBM Bersubsidi, maka beban subsidi APBN akan semakin besar. Hal ini akan menambah beban APBN, karena konsumsi BBM bersubsidi sudah melampaui kuota yang ditetapkan, sehingga pembayaran dana subsidi kepada

PT. Pertamina (Persero) diperkirakan akan terlambat dan pada akhirnya mengganggu distribusi BBM.

Dewan mengikuti dengan seksama dan merasa prihatin terhadap terjadinya kebocoran tangki 31 T-2 di Komplek Pertamina Refinery Unit (RU) IV di Cilacap Jawa Tengah, beberapa hari yang lalu. Atas kejadian ini, kalangan Dewan meminta Pemerintah melakukan investigasi secara menyeluruh atas kebakaran tiga tangki tersebut. Pertamina harus bisa menjamin ketersediaan BBM bagi kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah yang selama ini dipasok dari Kilang Cilacap, meningkatkan standar keamanan dan melakukan evaluasi teknis pengoperasian kilang secara menyeluruh, agar kejadian serupa ini dapat dihindarkan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kalangan Dewan melihat telah terjadi lonjakan harga pangan di pasar dunia. Kita mengingatkan Pemerintah untuk tidak bermain-main dengan masalah pangan, khususnya masalah stok beras nasional. Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Jepang pada 11 Maret 2011, akan meningkatkan permintaan terhadap beberapa komoditas pangan dunia, seperti beras, gandum, dan sereal. Pemerintah harus banyak belajar dari krisis pangan dunia pada tahun 2008 lalu, dimana terjadi lonjakan harga pangan dunia dan berkurangnya stok pangan dunia.

Krisis pangan dan energi merupakan persoalan krusial yang mudah muncul akibat berbagai faktor, baik karena perubahan iklim maupun gejolak politik di negara produsen. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dalam tiga tahun terakhir, tetapi apabila gejolak harga pangan tidak dapat dikendalikan Pemerintah, maka akan menggerus daya beli masyarakat, dan penduduk miskin dapat bertambah. Pemerintah harus meningkatkan produksi dan efisiensi pangan, terutama beras, jagung, kedelai, gula, dan daging, dengan berbagai terobosan kebijakan, agar kebutuhan pangan dapat tercukupi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan terjadinya dua peristiwa yang dapat berpengaruh bagi usaha pengembangan dunia perbankan di Indonesia, yaitu kasus meninggalnya seorang nasabah Citibank saat melakukan klarifikasi atas besarnya tagihan utang terhadap bank tersebut, dan pembobolan dana nasabah oleh Relation Manager Citibank. Atas terjadinya kasus ini, Komisi XI mengundang rapat Gubernur BI, Kepolisian dan Manajemen Citibank. Rapat menyimpulkan antara lain agar seluruh aturan Bank Indonesia terkait perlindungan nasabah, baik berkaitan dengan penagihan maupun penawaran kartu kredit, untuk direview/dikaji ulang. Dewan juga mengharapkan Bank Indonesia meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada dunia perbankan, agar kejadian serupa tidak terjadi di masa depan, termasuk sanksi kepada Citibank.

Sidang Dewan yang terhormat,

Permasalahan ekonomi yang mendapat perhatian Dewan antara lain pertumbuhan ekonomi Indonesia 2011 sebesar 6,4%. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah harus lebih serius mendorong sektor riil, salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga pinjaman (*prime lending rate*). Dewan dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk menurunkan tingkat suku bunga pinjaman, agar perekonomian domestik termasuk usaha mikro, usaha kecil, dan menengah (UMKM) yang telah lama menanti penurunan suku bunga pinjaman, dapat terus berkembang.

Sudah seharusnya otoritas moneter lebih bijak menentukan momen untuk menerapkan kebijakan pengendalian inflasi, dan kapan saatnya untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Ketika pergerakan harga-harga relatif stabil dan inflasi relatif rendah, maka kebijakan menurunkan suku bunga pinjaman merupakan keputusan yang tepat. Strategi ini tidak akan berdampak signifikan terhadap tekanan inflasi sepanjang sistem distribusi barang sudah tertata dan terlaksana dengan baik. Dengan pertumbuhan sektor riil yang di dalamnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), maka

akan memperluas lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masalah lain yang juga menjadi perhatian kita adalah masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Pembentukan Tim Khusus DPR-RI tentang TKI yang dipimpin Wakil Ketua DPR-RI Koordinator Bidang Kesra, dimaksudkan untuk mendorong Pemerintah, dalam hal ini Menakertrans, Menlu, Kepala BNP2TKI, untuk segera menangani dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja di Arab Saudi. Dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Pemerintah menyimpulkan, bahwa Tim Khusus Penanganan TKI tetap mengawasi upaya-upaya yang telah disiapkan Pemerintah dan BNP2TKI dalam melakukan pemulangan TKI *overstayers* di Arab Saudi, termasuk pemulangan 2972 WNI/TKI *overstayers* yang akan dilakukan 22 April mendatang. Tim Khusus mendorong pengetatan terhadap mekanisme pengiriman TKI yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Agama, guna meminimalisir munculnya TKI ilegal melalui penyalahgunaan paspor haji dan umroh untuk bekerja di Timur Tengah.

Tim Khusus juga mendorong Pemerintah untuk meningkatkan peran dalam rangka program yang terintegrasi secara menyeluruh pada masa purna penempatan dan pengelolaan remitansi TKI. Mengingat 85% permasalahan TKI bersumber di dalam negeri, maka Tim Khusus meminta kepada Pemerintah untuk memberikan peran kepada Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan Calon TKI.

Dalam Masa Sidang III ini, Komisi IX juga telah membahas permasalahan Susu yang tercemar *Enterobacter Sakazakii*. Rekomendasi dari hasil Raker dengan Pemerintah, Komisi Dewan meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan penelitian ulang terhadap seluruh merk susu yang ada di Indonesia, dan mengumumkan kepada masyarakat atas hasil penelitian ulang tersebut.

Berkaitan dengan radiasi nuklir pasca gempa dan tsunami di Jepang dan menyikapi kekhawatiran masyarakat terhadap masalah ini, Komisi IX telah meminta Kementerian Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang diambil dalam menangani resiko tersebut. Kementerian Kesehatan diminta untuk terus melakukan pengawasan kesehatan terhadap WNI yang kembali dari Jepang. Selain itu, terhadap pangan olahan impor asal Jepang, Badan Pengawas Obat dan Makanan diminta memberlakukan aturan dengan mewajibkan setiap produk pangan olahan impor menyertakan sertifikat bebas radioaktif.

Berkaitan dengan mutu dan keamanan makanan/protein hewani yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia, Komisi IV meminta kepada Pemerintah untuk berkoordinasi dengan instansi berwenang, untuk melakukan tindakan hukum terhadap importasi ikan ilegal dan daging ilegal, dengan mempertimbangkan untuk dimusnahkan apabila tidak sesuai dengan syarat perijinan dan peraturan perundang-undangan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Penyelenggaraan SEA Games 2011 ke-26 di Palembang dan Jakarta, terus dipantau oleh Dewan. Selama ini muncul kekhawatiran, apakah SEA Games yang akan diselenggarakan pada 11-25 November 2011 tersebut dapat berlangsung dengan baik, mengingat masih banyaknya kendala dalam persiapannya. Dewan perlu terus mengawal persiapan penyelenggaraan SEA Games ini, dan menghimbau kepada Pemerintah agar bekerja keras, cerdas, dan cermat. Pemerintah perlu terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka membangun kesiapannya sebagai tuan rumah. Dewan berharap, SEA Games kali ini dapat kembali membangkitkan semangat berprestasi dan semangat kebangsaan kita, dalam rangka mencapai kejayaan olah raga Indonesia baik di tingkat regional maupun internasional.

Di sisi lain, kita semua bangsa Indonesia khususnya para pecinta sepakbola, merasa lega, akhirnya kisruh PSSI akan segera berakhir dengan telah dibentuknya Komite Normalisasi oleh FIFA. Komite ini ditugaskan untuk

menyelesaikan kemelut di tubuh PSSI, bahkan FIFA telah menunjuk Saudara Agum Gumelar sebagai Ketua Komite. Ada tiga misi yang diemban oleh komite ini, antara lain menggelar kongres pemilihan ketua umum PSSI sebelum tanggal 21 Mei 2011 sesuai Kode Pemilihan FIFA dan Statuta PSSI. Komite ini juga ditugaskan untuk menjalankan aktifitas keseharian PSSI dalam semangat rekonsiliasi sampai terbentuknya pengurus baru.

Oleh karena itu, kami mendukung keputusan ini demi menyelamatkan PSSI dari kepentingan di luar kepentingan olahraga. Kita menunggu hadirnya kepengurusan baru PSSI, yang diharapkan membawa harapan-harapan baru bagi prestasi sepakbola Indonesia, baik di kancah nasional maupun internasional.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada akhir-akhir ini juga menjadi perhatian Dewan. Dewan mengingatkan kembali kepada Pemerintah, bahwa Pasal 28H UUD 1945 dan UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan mengamanatkan, setiap orang berhak mendapat pelayanan kesehatan. UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, juga memberikan amanat akan hak sehat, sebagai perwujudan negara kesejahteraan. Oleh karenanya, setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan atas kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya. Sehubungan dengan itu, Dewan mengimbau Pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan Jamkesmas, agar peristiwa penelantaran pasien dapat dihindarkan.

Berkaitan dengan itu, maka Pimpinan Dewan sangat mengharapkan, agar pembahasan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan luncheon RUU tahun 2010, dapat segera dilanjutkan. Kepada Pemerintah, diharapkan dapat melakukan dialog kembali untuk menyelesaikan substansi yang krusial, yang diatur dalam RUU ini.

Selain masalah kesehatan, masalah pendidikan juga menjadi perhatian Dewan. Pada Rapat Kerja Komisi X dengan Mendiknas pada

pertengahan Maret 2011, telah dibahas mengenai masalah pelaksanaan Program Data Pokok Pendidikan. Disepakati pula bahwa Dewan dan Pemerintah akan memperdalam pembahasan postur anggaran pendidikan yang memperhatikan kebutuhan bagi penyelesaian Wajar-Dikdas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) 9 tahun, sebagai pertimbangan bagi Pemerintah dalam penyusunan Pagu RAPBN 2012. Pada Raker tersebut, juga telah dibahas mengenai persiapan pelaksanaan Ujian Nasional 2011, Otonomi Pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), termasuk masalah-masalah yang dicermati Komisi X dengan Pemerintah. Untuk itulah, Dewan akan melakukan pengawasan melalui kunjungan kerja spesifik ke daerah-daerah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terjadinya gempa bumi berkekuatan 8,9 Skala Richter disusul tsunami setinggi 10 meter yang menelan puluhan ribu korban dan menghancurkan sebagian wilayah Jepang, harus mampu menyadarkan kita, bahwa Indonesia juga merupakan negara yang rawan bencana. Rakyat Indonesia, pemerintah dan seluruh anggota Dewan menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas korban gempa dan tsunami, semoga keadaan akibat bencana ini dapat ditanggulangi cepat pulih.

Kita menyadari, bahwa ada banyak hal yang dapat dipelajari dari penanganan bencana di Jepang. Dalam menangani bencana, Bangsa Jepang adalah bangsa yang patut dicontoh, dimana di tengah kedukaan mendalam, mereka tetap menunjukkan semangat hidup yang luar biasa, dan berusaha mengatasi masalah pasca bencana dengan seoptimal mungkin. Selain teknologi deteksi bencana yang canggih, mereka tidak mudah panik menghadapi bencana. Pada saat terjadi gempa, warga Jepang terlihat lebih tanggap. Prosedur dan latihan yang dilakukan selama bertahun-tahun, telah membentuk sikap masyarakat dalam menghadapi gempa dan proses evakuasi korban berjalan tertib.

Bercermin dari proses penanganan bencana di Jepang, Pemerintah Indonesia harus menyadari pentingnya **sistem mitigasi bencana yang terencana dan terpadu**, mulai dari sistem deteksi dini, ketahanan infrastruktur terutama bangunan tahan gempa, sistem informasi darurat, prosedur penanganan saat gempa terjadi, manajemen rehabilitasi pasca gempa, serta penyuluhan gempa. Penyuluhan dan simulasi gempa sebaiknya mulai dilakukan sejak dini, demikian juga *early warning system* yang ada, harus terus dikembangkan sehingga dapat mengurangi jumlah korban jiwa maupun kerusakan akibat bencana.

Berbagai bencana alam seperti tanah longsor, banjir bandang, lahar dingin merapi, serta kemungkinan meletusnya beberapa gunung berapi di tanah air, harus mendapatkan perhatian Pemerintah terutama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita semua tidak menginginkan, bencana-bencana ini nantinya membawa dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat, memunculkan kemiskinan-kemiskinan baru, kehilangan lahan, merusak perumahan, dan sarana-prasarana.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berkaitan dengan masalah internasional, akhir-akhir ini, perhatian kita tertuju pada pergolakan yang terjadi di beberapa negara arab, seperti Tunisia, Mesir, Libya dan lain-lain. Isu pokok terjadinya pergolakan ini berkaitan dengan tuntutan demokratisasi di bidang politik kenegaraan, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. Keprihatinan mendalam dari kalangan DPR-RI, Pemerintah, dan Masyarakat Indonesia adalah situasi Libya yang makin tidak kondusif setelah keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1973 yang menetapkan zona larangan terbang di seluruh Libya. Meskipun, resolusi ini dimaksudkan agar konflik yang terjadi di negara tersebut tidak meluas menjadi perang saudara dan diselesaikan secara damai dan demokratis, namun kita menyayangkan sikap beberapa negara,

yang secara sepihak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri Libya melalui aksi militer.

Sebagai negara anggota PBB, Pemerintah Indonesia telah menyatakan harapannya agar pelaksanaan Resolusi DK-PBB tidak sampai memunculkan siklus kekerasan baru, karena kita berkeinginan agar warga sipil di sana diberi perlindungan. Indonesia berharap, masalah ini diselesaikan secara damai melalui dialog, dengan mengedepankan hak setiap warga Libya, untuk dapat menentukan masa depannya secara demokratis, karena pada akhirnya cara damai lah yang dapat menyelesaikan masalah dalam negeri Libya.

Dewan berharap, agar Pemerintah terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Libya sambil melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang sedang berada di negara tersebut.

Demikian pula dengan konflik yang terjadi di perbatasan Thailand dan Kamboja, Pimpinan Dewan mendukung Pemerintah untuk turut serta melakukan upaya-upaya damai guna mencegah terjadinya eskalasi konflik menjadi perang terbuka di antara sesama negara anggota ASEAN. Sebagai Ketua ASEAN di tahun 2011, Pemerintah Indonesia hendaknya senantiasa berupaya menciptakan situasi yang kondusif di kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja melalui pertemuan di Bogor tanggal 7-8 April 2011, diharapkan dapat menjadi momentum terbaik bagi Indonesia, untuk menjadi negara yang memiliki kapasitas dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dewan tidak henti-hentinya menjalankan diplomasi parlemen sebagai upaya untuk menjalin kerjasama dan persahabatan dengan parlemen-parlemen berbagai negara-negara di dunia. Berbagai kegiatan telah

dilakukan, dan berbagai konferensi berskala internasional juga telah dihadiri dengan partisipasi aktif dari para anggota Dewan. Peran DPR-RI dalam diplomasi parlemen telah mendapatkan apresiasi positif dari anggota-anggota parlemen, baik di tingkat regional maupun multilateral.

Kita patut berbangga, salah seorang anggota Dewan, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, terpilih sebagai ***President of Coordinating Committee of Woman Parliamentarian of Inter-Parliamentary Union (IPU)***. Dengan jabatan ini, Indonesia secara langsung menjadi anggota Executive Committee IPU dan juga anggota working group on contribution bersama negara Asia-Pasifik lainnya yaitu, China, India, Jepang dan Australia. Kita ucapkan selamat, mudah-mudahan kiprahnya dapat mewarnai aktifitas DPR-RI dalam percaturan politik internasional.

Dalam kaitan dengan diplomasi parlemen, pada pertengahan Maret 2011 yang lalu, DPR-RI telah mengirimkan delegasi guna mengikuti ***The 4th Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Global Conference*** yang berlangsung di Mexico City dipimpin oleh Ketua BKSAP Dr. Hidayat Nur Wahid. GOPAC merupakan jaringan global anggota parlemen dengan berbagai upaya yang berkomitmen memerangi korupsi. DPR mengharapkan tercipta jaringan global untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas di dalam pemerintahan, serta menciptakan koalisi yang kuat, guna meningkatkan pendekatan pengambilan keputusan secara kolektif dalam menemukan solusi praktis dan inovatif dalam memerangi korupsi.

Mengingat pengalaman Indonesia dalam penanganan korupsi, DPR-RI diminta oleh Sidang GOPAC untuk menyelenggarakan sidang ***Executive Committee South East Asia Parliamentarian Against Corruption (SEAPAC)*** pada sekitar bulan November tahun ini.

Kegiatan keparlemenan lain yang diselenggarakan DPR-RI adalah Peringatan 100 Tahun Hari Perempuan Internasional. Melalui seminar dengan tema **Peran Perempuan Indonesia dalam Demokrasi**, makna yang dapat diambil adalah meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya

perempuan, tentang peran penting mereka dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang sosial-ekonomi, maupun bidang politik. DPR mengharapkan, perempuan Indonesia giat mengikuti berbagai isu aktual di tingkat internasional dan secara bersama-sama dengan kaum wanita di seluruh dunia, memperjuangkan hak-hak perempuan yang hingga saat ini masih termajinalkan.

Kegiatan ***AIPA Seminar on Accelerating The Achievement of MDG-5 Through the Role of Women Parliamentarians*** yang berlangsung dari tanggal 9–12 Maret 2011 di Kamboja, juga merupakan forum bagi para Anggota Parlemen Perempuan AIPA untuk saling berbagi pengalaman dalam upaya menghadapi tantangan pencapaian sasaran MDGs, yaitu usaha penurunan tingkat kematian ibu dan anak. Seminar dihadiri delegasi DPR-RI, telah memaparkan presentasi dengan tema: *Family Planning and the Importance of Co-opting Men*. Delegasi DPR-RI juga menyampaikan *Country Report*, menguraikan tentang turunnya angka kematian ibu di Indonesia dari 390 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007.

Berkaitan dengan Panja MDGs, BKSAP DPR-RI telah memutuskan untuk melanjutkan kegiatannya dalam Masa Persidangan yang akan datang, untuk mendorong percepatan pencapaian MDGs oleh Pemerintah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Mengakhiri Pidato Penutupan ini, kita patut bersyukur bahwa Rapat Paripurna DPR telah memberikan persetujuan terhadap Peraturan DPR-RI tentang Kode Etik dan Peraturan DPR-RI tentang Tata Beracara BK DPR-RI. Walaupun dalam pengambilan keputusan ini tidak dihadiri oleh dua fraksi DPR, namun keputusan ini tetap berlaku. Dengan adanya Kode Etik yang baru, anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah memiliki landasan etik atau filosofis yang mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan. Kode Etik ini bersifat mengikat, dan wajib dipatuhi, demi menjaga martabat, kehormatan,

citra dan kredibilitas DPR-RI. Tata Beracara BK DPR-RI dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 129 dan pasal 216 ayat (2) UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kita berharap dengan berlakunya Kode Etik dan Tata Beracara BK DPR-RI, semua anggota DPR dapat mematuhi.

Demikianlah berbagai hal terkait perkembangan pelaksanaan fungsi Dewan selama Masa Sidang III Tahun Sidang 2010-2011, serta pandangan dan sikap Dewan terhadap beberapa isu aktual di atas. Besok tanggal 9 April 2011, Dewan akan memulai masa reses. Semoga masa reses nanti dapat dimanfaatkan seluruh Anggota Dewan untuk melihat, mendengar dan menampung berbagai aspirasi di masyarakat demi perbaikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

Jakarta, 8 April 2011

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DR. H. MARZUKI ALIE

**PERKEMBANGAN RUU TAHUN 2011
PER 7 APRIL 2011**

A. RUU LUNCURAN TAHUN 2010

NO	AKD	RUU	PENGUSUL	TAHAPAN PEMBAHASAN
1.	KOMISI I	JUDUL DALAM PROLEGNAS : RUU TENTANG INTELIJEN <i>BERUBAH MENJADI :</i> RUU TENTANG INTELIJEN NEGARA	DPR RI	PEMBICARAAN TK I
2.	KOMISI I	RUU TENTANG KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA	PEMERINTAH	PEMBICARAAN TK I
3.	KOMISI II	RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM	DPR RI	PEMBICARAAN TK I
4.	KOMISI III	RUU TENTANG KEIMIGRASIAN	PEMERINTAH	SELESAI
5.	KOMISI III	RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN	DPR RI	PEMBICARAAN TK I

NO	AKD	RUU	PENGUSUL	TAHAPAN PEMBAHASAN
		2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL		
6.	KOMISI V	JUDUL DALAM PROLEGNAS : RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1985 TENTANG RUMAH SUSUN <i>BERUBAH JUDUL MENJADI :</i> RUU TENTANG RUMAH SUSUN	DPR RI	PEMBICARAAN TK I
7.	KOMISI VI	RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG KOPERASI	PEMERINTAH	PEMBICARAAN TK I
8.	KOMISI VI	RUU TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	DPR RI	PEMBICARAAN TK I
9.	KOMISI VI	RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG.	DPR RI	PEMBICARAAN TK I

NO	AKD	RUU	PENGUSUL	TAHAPAN PEMBAHASAN
10.	KOMISI VI	RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.	DPR RI	PEMBICARAAN TK I
11.	KOMISI VII	RUU TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL	PEMERINTAH	SELESAI
12.	KOMISI VIII	RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH	DPR RI	PEMBICARAAN TK I
13.	KOMISI VIII	RUU TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	DPR RI	PEMBICARAAN TK I
14.	KOMISI XI	RUU TENTANG MATA UANG	DPR RI	PEMBICARAAN TK I
15.	KOMISI XI	RUU TENTANG AKUNTAN PUBLIK	PEMERINTAH	SELESAI
16.	KOMISI XI	RUU TENTANG TRANSFER DANA	PEMERINTAH	SELESAI
17.	BALEG	RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	DPR RI	PEMBICARAAN TK I
18.	BALEG	RUU TENTANG BANTUAN HUKUM	DPR RI	PEMBICARAAN TK I

NO	AKD	RUU	PENGUSUL	TAHAPAN PEMBAHASAN
19.	PANSUS	RUU TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	DPR RI	PEMBICARAAN TK I
20.	PANSUS	RUU TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN	PEMERINTAH	PEMBICARAAN TK I
21.	PANSUS	RUU TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	DPR RI	PEMBICARAAN TK I

REKAPITULASI:

- 1. RUU YANG SUDAH SELESAI: 4 RUU**
 - a. RUU Usul DPR RI - RUU
 - b. RUU Pemerintah 4 RUU
- 2. RUU YANG MASIH DALAM PROSES PEMBICARAAN TK I 17 RUU**
 - a. RUU Usul DPR RI 14 RUU
 - b. RUU Pemerintah 3 RUU

B. RUU PRIORITAS 2011

1. RUU YANG SUDAH MEMASUKI PEMBICARAAN TK I

NO	AKD	WAKIL PEMERINTAH	RUU
1.	KOMISI II	1. MENTERI DALAM NEGERI 2. MENTERI HUKUM DAN HAM	RUU TENTANG KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (RUU PEMERINTAH)
2.	KOMISI III	1. MENTERI HUKUM DAN HAM 2. MENTERI SOSIAL 3. MENNEG. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4. MENNEG. PAN DAN REFORMASI BIROKRASI	JUDUL DALAM PROLEGNAS : RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK (RUU PEMERINTAH) <u>JUDUL YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMERINTAH :</u> RUU TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
3.	KOMISI IV	1. MENTERI KEHUTANAN 2. MENTERI DALAM NEGERI 3. MENTERI HUKUM DAN HAM	RUU TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR (RUU DPR)
4.	KOMISI V	1. MENTERI PERHUBUNGAN 2. MENTERI HUKUM DAN HAM 3. MENTERI ESDM	RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (RUU PEMERINTAH)

NO	AKD	WAKIL PEMERINTAH	RUU
5.	PANSUS	1. MENTERI DALAM NEGERI 2. MENTERI HUKUM DAN HAM 3. MENTERI KEUANGAN 4. MENNEG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS	RUU TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN (RUU PEMERINTAH)